

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak kebijakan-kebijakan di berbagai bidang terutama bidang politik dan agama. Sistem pemerintahan dan kebijakan di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 45. Pancasila adalah pilar ideologi dan dasar negara untuk mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila diharapkan dapat berkembang dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam sila keempat Pancasila, tertulis bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat ...”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Pancasila berjalan dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat, berarti kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah harus menjalankan kedaulatan (hukum) yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat. Kekuasaan Trias Politika (*Montesquieu*), pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan antar lembaga negara yang

menjalankan kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat.¹

Pada Pancasila sila pertama yang berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa", menyiratkan makna jika masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dengan adanya sila pertama ini, negara juga wajib menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya tanpa adanya diskriminasi sehingga bisa menciptakan sikap toleransi setiap warga negaranya.

Hampir semua orang memahami jika keragaman dan perbedaan adalah suatu ketentuan yang harus diterima dan diakui, meskipun terkadang ada sikap yang tidak pantas terhadap keragaman dalam banyak kasus yang menjadi sumber pertengkaran, sehingga bisa menjadi pemicu adanya konflik dan permusuhan. Dengan adanya keragaman dan perbedaan tertentu dapat membuka pintu yang bisa menjadi pemicu terjadinya bermacam-macam pertengkaran dan konflik kemanusiaan.

Agama merupakan media yang paling tepat untuk menggambarkan dan memaknai hakikat kemanusiaan, karena agama tidak hanya berbicara dalam kerangka berpikir material manusia itu sendiri, akan tetapi sampai pada derajat yang lebih terinti dari manusia itu, yaitu kemanusiaannya. Manusia

¹ Andi Azikin, "Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 1, no. 2 (2018): 84.

diciptakan oleh Tuhan dengan keragaman dan solidaritas yang memungkinkan untuk menjalin toleransi.²

Hal-hal mengenai kebijakan politik ataupun agama yang menekankan toleransi antar umat manusia tidak hanya diterapkan di Indonesia, namun ditekankan dan diterapkan juga di salah satu kerajaan, yaitu Kerajaan Mughal di India.

Kekaisaran Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi di India. Kekaisaran Mughal menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium Islam yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India.³ Kerajaan Mughal merupakan kerajaan Islam yang terbesar dan terakhir di India.⁴ Kerajaan Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Babur (1482–1530 M), salah satu cucu dari Timur Lenk. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Ferghana. Puncak kegemilangan Kerajaan Mughal terjadi pada masa Sultan Jalaluddin Akbar.⁵

Sultan Jalaluddin Akbar membuat suatu gebrakan yang tak tertandingi dan belum pernah ada sebelumnya, sehingga menjadi suatu prestasi luar biasa. Sultan Jalaluddin Akbar mempersatukan India dalam lingkup satu kesatuan sosial, politik, dan agama pada masa kekuasaan Islam di India. Sultan Jalaluddin

² Anwarsyah Nur, *DIN-I-ILAH: Pemikiran Sinkretis Keagamaan Sultan Akbar The Great (1556-1605)*, Pertama. (Bandung: Citapustaka Media, 2014).

³ Sandi Nur Rohman, *Dinasti Mughal: Menelusuri Jejak Peradaban Islam Dunia*, 1st ed. (Yogyakarta: Diandara Kreatif, 2017), hlm. 1.

⁴ Supardi, "Perkembangan Dan Peninggalan Dinasati Moghul Di India 1525-1857," *Jurnal Pendidikan Dan Sejarah: Istoria* 5, no. 2 (2008), hlm. 91.

⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 147.

Akbar sudah menunjukkan kemampuan lainnya bukan hanya dalam bidang kemiliteran. Akan tetapi, ia juga menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang, antara lain: bidang administratif atau pemerintahan, bidang ekonomi, bidang pembangunan infrastruktur, dan arsitektur bangunan, dan pada bidang lainnya. Banyaknya prestasi luar biasa yang diraih Sultan Jalaluddin Akbar pada masa pemerintahannya menjadikan ia menduduki posisi tertinggi di antara sederetan pemimpin Islam India.⁶

Masa pemerintahan Sultan Jalaluddin Akbar penuh dengan ekspansi, sehingga wilayah dinasti Mughal semakin luas. Daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan adalah Chunda, Ghand, Kashmir, Chitar, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, Gawilganj, Ahmad Nagar dan Ashgar. Periode ini merupakan puncak kejayaan kerajaan Mughal. Hal ini didukung oleh stabilitas dan kemajuan pemerintahan. Sistem pemerintahan Akbar adalah militeristik. Seorang raja memegang pemerintahan pusat. Sedangkan pemerintah daerah dipegang oleh seorang *Sipah Salar* (kepala komandan), dan sub distrik dipegang oleh *Faujdar* (komandan).⁷

Sebagian umat agama Islam terutama dari kalangan Sunni menganggap pendekatan Sultan Jalaluddin Akbar untuk melakukan reformasi sosial politik maupun agama sudah keluar batas dari ajaran agama Islam, bahkan dari golongan Hindu

⁶ Anwarsyah Nur, Op.Cit, hlm. 8.

⁷ Ali Sodikin et al., *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Masa Modern* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 184.

terutama dari golongan kasta Brahmana juga beranggapan sama. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang menerima adanya kebijakan yang digagas oleh Sultan Jalaluddin Akbar dan diterapkan pada pemerintahan kerajaan Mughal.

Maka dari itu Sultan Jalaluddin Akbar dianggap sebagai sosok yang sangat kontroversial karena program reformasi yang dilakukannya itu. Di satu sisi, kebijakan Sultan Jalaluddin Akbar berhasil mempersatukan semua rakyat India menjadi satu kesatuan tanpa membedakan etnis, budaya, dan agama karena pada masa pemerintahan sebelumnya tak pernah terjadi hal seperti itu. Akan tetapi di sisi lain, secara teologis Sultan Jalaluddin Akbar dianggap sudah melewati batas dari ajaran agama Islam. Namun Sultan Jalaluddin Akbar berdalih bahwa dirinya masih penganut agama Islam yang taat.

Dalam persoalan agama, Sultan Jalaluddin Akbar penuh dengan sikap toleransi terhadap semua masyarakatnya sehingga sangat menghormati masyarakat mayoritas India yaitu masyarakat yang menganut agama Hindu. Bahkan tidak ada paksaan untuk masyarakat India penganut agama lain untuk memeluk dan menjadi penganut agama Islam. Ketika Sultan Jalaluddin Akbar memegang kekuasaan kerajaan Mughal, dengan segala kemampuan dan kepiawaiannya ia sering mendatangkan para ahli dari beragam pemeluk agama lain yang ada di India seperti dari agama Kristen, Islam (Syi'ah dan Sunni), Hindu, dan Yahudi ke Ibadat Khana atau "*The House of Devotion*" yang merupakan ruang diskusi di istana untuk berdialog dan membahas beragam masalah yang spesifik mengenai agama, pengembangan

filsafat, serta yang terpenting adalah kesejahteraan dan kerukunan masyarakat India yang multikultural. Akan tetapi ulama Islam Sunni masih memegang teguh ajaran agama Islam yang murni, sehingga pada saat berdiskusi mengenai reformasi yang digagas oleh Sultan Jalaluddin Akbar memberikan respon yang dianggap kaku pada saat berdiskusi dengan para ahli agama lainnya, terutama dari kelompok Syi'ah, Kristen dan Yahudi. Perjumpaan dengan para ahli untuk berdialog dan berdiskusi tersebut dilakukan rutin pada malam Jumat dan malam Sabtu.

Inovasi yang dibuat oleh Sultan Jalaluddin Akbar dalam berdiskusi dan berdialog diantara sesama ahli agama perlahan-lahan berdampak kepada sudut pandang dan pola pikir para ulama Islam Sunni pada saat itu menjadi berpikir lebih mendasar, logis, dan terbuka dalam menerima perbedaan pandangan, pendapat, dan anggapan dari pihak lain. Sultan Jalaluddin Akbar dengan tulus melakukan upaya reformasi imperiumnya di semua bidang.⁸

Dalam bidang politik Sultan Jalaluddin Akbar menerapkan apa yang dinamakan dengan politik *Sulh-E-Khul* (toleransi universal), dengan politik ini semua rakyat India dipandang sama derajatnya. Saat menjalankan pemerintahan, Sultan Jalaluddin Akbar memprioritaskan terwujudnya kestabilan serta kedamaian di India. Ia mengenal dan memahami jika rakyatnya merupakan masyarakat yang majemuk, baik dari segi etnis maupun agama. Sehingga, kebijakan-kebijakan dibuat guna

⁸ Anwarsyah Nur, Op.Cit, hlm. 10.

menciptakan negara yang tentram dan damai dengan masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai toleransi.

Dalam bidang agama Sultan Jalaluddin Akbar menciptakan *Din-I-Ilahi* yaitu menjadikan semua agama yang ada di India menjadi satu. Tujuannya adalah kepentingan stabilitas politik. Dengan adanya penyatuan agama ini diharapkan tidak terjadi permusuhan antar pemeluk agama.⁹ *Din-I-Ilahi* diciptakan berlandaskan pertimbangan para ahli dari berbagai kepercayaan yang ada di India yaitu agama Islam, Hindu, Budha, Jain, dan Zoroaster. *Din-I-Ilahi* berupa peraturan yang berkenaan dengan sikap toleransi dalam beragama dan menghindari adanya diskriminasi terhadap agama minoritas. Penerapan kebijakan agama oleh Sultan Jalaluddin Akbar berperan menjadi penyelaras kehidupan bermasyarakat di India.¹⁰ Terciptanya *Din-I-Ilahi*, menjadikan Islam menjadi tertekan, sementara Hindu dan Sikh serta Missionari Kristen menjadi lebih bebas.¹¹

Banyak para ahli sejarah yang menganggap bahwa Akbar sudah keluar dari Islam karena *Din-I-Ilahi* yang kontroversial. Namun tak sedikit juga para ahli sejarah Islam menolak anggapan tersebut. Hal itu yang menjadi alasan peneliti tertarik dengan penelitian ini, yaitu implikasi kebijakan politik dan agama Sultan Jalaluddin Akbar yang difokuskan pada sistem politik *Sulh-I-Khul* dan *Din-I-Ilahi*. Kebijakan Sultan Jalaluddin

⁹ Ali Sodiqin et al., Op.Cit, hlm. 185.

¹⁰ Sari Agustina et al., "Jalaluddin Muhammad Akbar 's Policy in India 1556-1605 C," *Jurnal Historica* 4, no. 1 (2020): 132.

¹¹ Umar Asasuddin Sokah, *DIN-I-ILLAHI: Kontroversi Keberagamaan Sultan Akbar Agung (India 1560-1605)*, 1st ed. (Yogyakarta: ITTAQA Press, 1994), hlm. 9.

Akbar yang menjadikan Mughal sebagai dinasti terbesar di India, pada kepemimpinan Sultan Jalaluddin Akbar menjadi puncak kejayaan Dinasti Mughal tersebut, dan Hindustan (India) sebagai daerah maju dimasanya. Kebijakan yang digagas oleh Sultan Jalaluddin Akbar kemudian digunakan sebagai acuan pemerintahan oleh penerus setelahnya, sampai India ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Inggris. Penulis berharap tulisan ini akan memberikan manfaat dan faedah untuk yang membacanya. Berlandaskan deskripsi latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menggali lebih lebih dalam lagi mengenai kebijakan politik dan agama Sultan Jalaluddin Akbar, terutama *Din-I-Ilahi* dan *Sulh-I-Khul* yang bisa menggambarkan keadaan politik dan agama di Mughal, maka dengan demikian penulis mengangkat judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK DAN AGAMA SULTAN JALALUDDIN AKBAR (1556-1605 M) DI MUGHAL INDIA”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas penulis berfokus pada penelitian implikasi kebijakan politik dan agama Sultan Akbar dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan politik Sultan Jalaludin Akbar di Mughal India?
2. Bagaimana kebijakan agama Sultan Jalaludin Akbar di Mughal India?

3. Bagaimana implikasi kebijakan politik dan agama Sultan Jalaluddin Akbar terhadap keberagaman di Mughal India?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan politik Sultan Jalaludin Akbar di Mughal India.
2. Untuk mengetahui kebijakan agama Sultan Jalaludin Akbar di Mughal India.
3. Untuk mengetahui implikasi kebijakan politik dan agama Sultan Jalaluddin Akbar terhadap keberagaman di Mughal India.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian kebijakan politik dan agama Sultan Akbar adalah:

1. Sebagai bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri.
2. Memberi referensi kepada adik tingkat yang akan sampai pada tahap penyusunan skripsi ditahun yang akan datang.
3. Sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti dan sebagai sarana pengucapan terimakasih kepada semua pihak yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan perkuliahan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian kebijakan politik dan agama Sultan Akbar, penulis menggunakan pendekatan kajian pustaka pada buku karya-karya ilmiah lainnya yang memaparkan tentang kebijakan politik dan agama Sultan Akbar. Adapun tinjauan pustaka yang akan menjadi referensi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Umar Asasuddin Sokah, “DIN-I-ILAHI: Kontrovesi Keberagaman Sultan Akbar Agung (India 1560-1605)”. (Yogyakarta: ITTAQA Press, Cetakan Pertama, Oktober 1994).

Buku ini memaparkan tentang sejarah Islam yang khususnya menyangkut satu babak terpenting sejarah Islam di India. Buku ini mengangkat pembahasan umumnya tentang kerajaan Mughal dan khususnya tentang perkembangan pemikiran dan kebijakan-kebijakan sultan Akbar Agung, di antaranya adalah *Din-I-Ilahi*. *Din-I-Ilahi* ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang permasalahan agama yang berkenaan dengan sikap toleransi dalam beragama dan menghindari adanya diskriminasi terhadap agama minoritas.

Persamaan buku ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang kebijakan agama Sultan Jalaludin Akbar yaitu *Din-I-Ilahi*. Perbedaan buku ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah buku ini membahas khusus untuk kebijakan agama, sedangkan skripsi yang dibahas penulis adalah kebijakan agama dan kebijakan politik Sultan Jalaluddin Akbar.

2. Sandi Nur Rohman, "DINASTI MUGHAL: Menelusuri Jejak Peradaban Islam Di Tanah Hindustan". (Yogyakarta: Diandra Kreatif, Cetakan Pertama, Desember 2017).

Buku ini memaparkan tentang dinasti Mughal dari asal-usul berdirinya, keruntuhannya, sampai pada peninggalan-peninggalan dari dinasti Mughal. Kekaisaran Mughal bercorak Islam yang mampu membangkitkan semangat umat Islam di India. Dalam buku ini juga memaparkan sejarah di mana pada saat itu peradaban di tanah India berjaya dan berhasil bahkan sampai 3,5 abad lamanya.

Persamaan buku ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang kerajaan Mughal. Perbedaan buku ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah buku ini hanya membahas kerajaan Mughal secara umum, sedangkan skripsi yang dibahas penulis adalah kerajaan Mughal secara khusus pada masa kepemimpinan Sultan Jalaluddin Akbar dan membahas kebijakan yang diterapkan Sultan Jalaludin Akbar di Mughal India.

3. Arwansyah Nur, "DIN-I-ILLAHI: Pemikiran Sinkretis Keagamaan Sultan Akbar The Great (1556-1605)". (Bandung: Citapustaka Media, 2014).

Buku ini membahas tentang pemikiran keagamaan yang sangat kontroversial di masa Sultan Jalaluddin Akbar berkuasa. Pemikiran itu dikenal dengan istilah *Din-i-Ilahi* (Tauhid Ilahi) atau *divine religion/divine faith* oleh para penulis Barat maupun sejarawan India. Pada buku ini *Din-I-Illahi* dibahas secara gamblang, mulai dari latar belakang perumusannya

hingga kontribusinya terhadap keharmonisan masyarakat India.

Persamaan buku ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang kebijakan agama Sultan Jalaludin Akbar yaitu *Din-I-Ilahi*. Perbedaan buku ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah buku ini membahas khusus untuk kebijakan agama, sedangkan skripsi yang dibahas penulis adalah kebijakan agama dan kebijakan politik Sultan Jalaluddin Akbar.

4. Jamilah Alimatul Ilmi, "Puncak Kegemilangan Kerajaan Mughal di India Pada Masa Pemerintahan Jalaludin Akbar (1556-1605 M)". (Skripsi Jurusan SKI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

Skripsi ini membahas secara gamblang tentang Kerajaan Mughal di India pada masa pemerintahan Sultan Jalaludin Akbar, menjabarkan bagaimana kerjaan Mughal mencapai puncak kegemilangannya pada masa Kepemimpinan Jalaludin Muhammad Akbar. Peran Sultan Jalaluddin Akbar dalam mengantarkan Kerajaan Mughal pada puncak kegemilangan begitu berdampak kepada perkembangan Islam di India. Dengan Kebijakan-kebijakannya, rakyat India sangat simpati kepadanya dan kehidupan sosial masyarakat saling menghormati serta senantiasa menjunjung tinggi toleransi.

Persamaan Skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah sama-sama membahas Kerajaan Mughal pada masa Sultan Jalaluddin Akbar. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah skripsi ini fokus membahas

pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Sultan Jalaluddin Akbar di berbagai bidang seperti di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan di berbagai bidang lainnya. Sedangkan skripsi yang dibahas penulis adalah kebijakan-kebijakan politik dan agama Sultan Akbar di Mughal India.

5. Eva Muzdalifah, “Peran Kerajaan Mughal Terhadap Perkembangan Peradaban Islam di India”. (Skripsi Jurusan SKI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

Skripsi ini memaparkan tentang Peran Kerajaan Mughal terhadap perkembangan peradaban Islam di India. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah sama-sama membahas Kerajaan Mughal. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah skripsi ini membahas secara umum Kerajaan Mughal yang fokus kepada pencapaian atau peran Kerajaan Mughal terhadap perkembangan peradaban Islam di India, sedangkan skripsi yang dibahas penulis adalah Kerajaan Mughal pada masa kepemimpinan Sultan Jalaluddin Akbar yang berfokus kepada kebijakan politik dan agama yang diterapkan oleh Sultan Jalaluddin Akbar di Mughal India.

F. Landasan Teori

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang dianjurkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah pada suatu kawasan tertentu. Pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu seringkali menjumpai

hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan.¹² Kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Agama sering didefinisikan sesuai dengan pengalamannya dan penghayatannya pada agama yang dianutnya. Mukti Ali mengatakan bahwa “Agama adalah percaya akan Tuhan Yang Esa, dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat”. Jelas Ali tidak sedang berbicara tentang agama dalam arti umum. Ia sedang mendefinisikan agama seperti yang dilihatnya dalam agama Islam.¹³

Islam mengajarkan dunia tentang persaudaraan universal. Dalam Islam, seorang budak pada hari ini bisa menjadi raja di kemudian hari dengan syarat ia memiliki kemampuan yang diperlukan.¹⁴ Ada lima tujuan pokok yang merupakan dasar yang bersifat religius bagi hak-hak asasi manusia yang ditetapkan Islam dalam pelaksanaan syariatnya, yakni: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, serta menjaga keturunan.¹⁵

Sultan adalah penegak hukum yang utama, namun ia tidak dapat melawan hukum yang sudah berjalan. Sultan hanya bebas membuat keputusan sendiri ketika terjadi ketidaksetujuan

¹² Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Afabeta, 2008), hlm. 13.

¹³ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar*, 1st ed. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hlm. 43.

¹⁴ Ali Sodikin et al., *Op.Cit*, hlm. 9.

¹⁵ Anwarsyah Nur, *Op.Cit*, hlm. vii.

di kalangan para hakim. Pembuatan semua peraturan sipil dan politik untuk kekuasaan politik juga adalah kekuasaan untuk seorang sultan, namun dalam pengesahannya tidak dapat menentang hukum syariat. Banyak para ahli sejarah yang mengartikan bahwa kekuasaan sultan tidak terbatas karena kekuasaan di tangan satu orang, pada kenyataannya demi untuk mempertaruhkan hubungan kerjasama dengan unsur-unsur yang kuat dalam negara, banyak kekuasaan politik yang memiliki batasan dan ketergantungan. Penguasa India perlu adanya ikatan dengan para bangaswan untuk mendapatkan sokongan untuk kerajaan Mughal. Ia juga harus mempertahankan kerjasama dengan para ulama dan ahli hukum karena mereka sangat berpengaruh bagi masyarakat Muslim.¹⁶

Para ilmuwan politik kontemporer berpandangan bahwa politik adalah proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang mengikat bagi suatu masyarakat. Pemerintah dan masyarakat melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan ketentuan politik, itu disebut dengan perilaku politik. Warga negara memang tidak memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, tetapi mereka memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan fungsi pemerintahan itu. Dalam sistem politik akan mencakup: 1) Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik ke luar ataupun ke dalam; 2). Penempatan nilai-nilai dalam masyarakat

¹⁶ Ali Sodikin et al., Op.Cit, hlm. 185.

berdasarkan kewenangan; 3). Penggunaan/kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak.¹⁷

Patuhnya rakyat terhadap pemimpinnya merupakan cara untuk menjaga stabilitas politik umat Islam itu sendiri, sehingga keadaan negara benar-benar aman dan penegakan syariat Islam terlaksana dengan baik karena hal itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan politik Islam.¹⁸

Islam bukan kekuatan luar pertama yang masuk ke kawasan India. Sebelumnya bangsa Arya pada abad ke-6 SM sudah menaklukkan India. Secara resmi Islam masuk pada tahun 711 M. Peradaban Islam mampu mengakar dan memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat. Islam sebagai kekuatan sosial dan politik pernah memerintah India selama kurang lebih tiga abad melalui Dinasti Mughal.¹⁹

Hadirnya Kekaisaran Mughal membentuk sebuah peradaban baru di India, di mana pada saat itu mengalami kemunduran dan keterbelakangan.²⁰ Kerajaan Mughal menghadapi kemunduran karena tidak ada sistem dan mekanisme suksesi kekuasaan, dan juga kurangnya integritas kepemimpinan generasi berikutnya. Gaya hidup hedonisme juga menjadi

¹⁷ Muhammad Fauzan Naufal, *Hubungan Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)*, (Skripsi) (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 15.

¹⁸ Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2-3.

¹⁹ Ali Sodikin et al., *Op.Cit*, hlm. 183.

²⁰ Sandi Nur Rohman, *Op.Cit*, hlm. i.

penyebab utama situasi politik yang rumit di Kerajaan.²¹ Kekaisaran Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam.²²

Kerajaan Mughal merupakan kerajaan bercorak Islam yang berhasil mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Jalaluddin Akbar dan dapat menguasai seluruh kawasan India bagian barat pada abad ke-18. Banyak prestasi yang diraih pada masa pemerintahan Sultan Jalaluddin Akbar, ia berhasil menyatukan masyarakat India tanpa mempersoalkan latarbelakang agama, etnis, dan budaya. Hal ini menjadi prestasi yang sangat luar biasa karena pada masa pemerintahan sebelumnya belum pernah ada yang bisa melakukan hal tersebut. Bangsa Mughal merupakan kabilah-kabilah besar yang menyerupai sebuah bangsa pengembala, hidup secara nomadik dan lihai mengayuhkan pedang perang, yang berasal dari daratan Asia (daratan Mongolia) yang luas memanjang dari Asia Tengah, Siberia Selatan, Tibet Utara, dan Turkistan Timur.

Sultan Jalaluddin Akbar dikenal sebagai orang yang bijak dan radikal, karena kebijakannya dilakukan untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan semua rakyatnya.²³ Sultan Jalaluddin Akbar selalu memprioritaskan terwujudnya negeri yang tentram dan damai. Ia mengetahui dan paham jika masyarakat India merupakan masyarakat yang multikultural, baik

²¹ M. Djamaluddin Miri, "Kemunduran Dan Kehancuran Kerajaan Mughal," *el harakah: Jurnal Budaya Islam* 11, no. 3 (2009): 216–225.

²² Sandi Nur Rohman, Op.Cit, hlm. i.

²³ Sari Agustina et al., Op.Cit, hlm. 125.

dari segi agama maupun etnis. Sehingga, kebijakan-kebijakan dibuat guna menciptakan negara yang tentram dan damai dengan masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Dalam bidang agama Akbar menciptakan *Din-i-ilahi* yaitu menjadikan semua agama yang ada di India menjadi satu. Tujuannya adalah kepentingan stabilitas politik. Dengan adanya penyatuan agama ini diharapkan tidak terjadi permusuhan antar pemeluk agama.²⁴ Dalam bidang politik Sultan Akbar menerapkan politik *Sulh-I-Khul* (toleransi universal). Dengan adanya politik ini semua rakyat dipandang sama, tidak dibedakan berdasarkan etnis, budaya, dan agama.²⁵

G. Metode Penelitian

Jika ditinjau dari isi rumusan masalah dan tujuannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan studi pustaka sebagai pendekatannya. Studi pustaka menyajikan hasil bacaan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti, literatur tersebut yang dapat dijadikan pedoman meliputi buku, artikel, di jurnal dan makalah seminar.²⁶

Dalam penelitian harus ada metode penelitian yang digunakan. Ada beberapa tahap penelitian sejarah, di antaranya adalah heuristik, kritik, interprestasi, dan historiografi.²⁷

²⁴ Ali Sodiqin et al., Op.Cit, hlm. 185.

²⁵ Badri Yatim, Op.Cit, hlm. 149.

²⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 17.

²⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

1. Heuristik

Mencari dan pengumpulan data adalah hal penting dalam sebuah penelitian, seperti yang dilakukan penulis dalam kajian pustaka. Pengumpulan data atau heuristik ini maksudnya adalah proses untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan pokok bahasa dalam penelitian, seperti buku, jurnal, dan karya lainnya yang kemudian dijadikan sebagai bahan dari penelitian yang dilakukan.²⁸ Maka penulis berusaha untuk mencari, mengumpulkan, serta memahami data yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian agar sumber yang didapat bisa membantu menyelesaikan objek kajian. Buku-buku yang didapatkan sebagian dari perpustakaan, sebagian dengan cara membeli di toko online, sebagian buku didapatkan dengan cara mengunduh dari web. Sumber yang didapatkan dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah:

- 1) Buku DIN-I-ILAHl: Kontrovesi Keberagaman Sultan Akbar Agung (India 1560-1605), karya Umar Asasuddin Sokah.
- 2) Buku DINASTI MUGHAL: Menelusuri Jejak Peradaban Islam Di Tanah Hindustan, karya Sandi Nur Rohman.
- 3) Buku DIN-I-ILLAHl: Pemikiran Sinkretis Keagamaan Sultan Akbar The Great (1556-1605), karya Arwansyah Nur.

²⁸ Ibid, hlm. 73.

Sumber sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Skripsi dengan judul Puncak Kegemilangan Kerajaan Mughal di India Pada Masa Pemerintahan Jalaludin Akbar (1556-1605 M), ditulis oleh Jamilah Alimatul Ilmi.
- 2) Jurnal Istoria Volume 3 nomor 2 dengan judul Perkembangan dan Peninggalan Dinasti Moghul di India 1525-1857, ditulis oleh Supardi.
- 3) Jurnal Historica Volume 4 Nomor 1 dengan judul Jalalludin Muhammad Akbar's policy in India 1556-1605 C, ditulis oleh Sari Agustina, dkk.

2. Kritik

Sumber sejarah hasil dari tahap pertama kemudian masuk ke tahap verifikasi atau kritik sejarah. Peneliti harus mengetahui kalau verifikasi itu ada dua macam. Yang pertama adalah autentitas, atau keaslian sumber dan kritik ekstern. Yang kedua adalah kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern. Sumber yang sudah dikumpulkan lalu dinilai dan ditelaah untuk menentukan kevalidannya dan membuktikan keasliannya.²⁹

3. Interpretasi

Tahap interpretasi ini peneliti melakukan penafsiran terhadap sumber sejarah agar tercapainya pemahaman terhadap sumber-sumber yang telah didapat pada tahap sebelumnya. Interpretasi itu ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis.³⁰

²⁹ Ibid, hlm. 77.

³⁰ Ibid, hlm. 78.

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis atau menguraikan sumber yang terkadang memiliki beberapa kemungkinan sehingga dapat merangkai fakta-fakta sejarah menjadi sesuatu yang bisa dipahami dan masuk akal. Proses penafsiran sumber berguna sebagai seleksi sejarah, maksudnya tidak berarti semua fakta sejarah kita tampilkan atau kita sertakan dalam laporan, akan tetapi memilih mana yang lebih relevan untuk disertakan dalam laporan.

4. Historiografi

Tahap terakhir dari penelitian sejarah adalah historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah. Pada tahap ini menyajikan hasil dari penelitian dalam bentuk tulisan yang tersusun secara sistematis dari tahap pertama sampai tahap ketiga, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Hasil tulisan yang disajikan berupa jawaban dari masalah-masalah yang diangkat oleh penulis sehingga menjadi sebuah karya ilmiah yang baik dan benar.³¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian akan terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika dalam laporan penelitian.

Bab II berisi tentang kerajaan Mughal di bawah Sultan Jalaluddin Akbar, meliputi: awal berdiri kerajaan Mughal,

³¹ Ibid, hlm. 80.

kerajaan Mughal di bawah kepemimpinan Sultan Jalaluddin Akbar, dan kerajaan Mughal paska Sultan Jalaluddin Akbar.

Bab III berisi tentang kebijakan politik dan agama Sultan Jalaludin Akbar di Mughal India, meliputi: kebijakan politik dan kebijakan agama.

Bab IV membahas tentang implikasi kebijakan politik dan agama Sultan Jalaluddin Akbar terhadap kebergamaan di Mughal India, meliputi: dinamika kehidupan politik di India dan keharmonisan agama di Mughal India.

Bab V berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

